

# Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah

Ali Nasrun, Rully Agus Hendra, Muhammad Priandi

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111

*E-mail:* eraha@is.its.ac.id

**Abstrak**— Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 mewajibkan Pengguna APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan mempunyai peran penting untuk mengukur kinerja pemerintah, apakah terkendali sesuai landasan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN, serta menjadi pendukung pengambilan keputusan. Diantara kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah lengkap dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi yang berjalan pada pemerintah Republik Indonesia saat ini bersifat desentralisasi atau menyebar ke seluruh instansi dalam platform *desktop application*. Kondisi ini tentu menimbulkan kendala-kendala dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Jumlah instansi penyelenggara akuntansi yang ribuan banyaknya dan tersebar lokasi geografis dengan dukungan fasilitas komunikasi yang tidak semuanya baik, telah cukup untuk menggambarkan kesulitan yang dihadapi. Integrasi sistem informasi adalah salah satu solusi yang dapat diambil. Pemerintah perlu segera membuat sistem informasi yang sebaran database dan aplikasinya sesedikit mungkin atau jika mungkin membuat *single database* dan aplikasi. Banyak teknologi yang bisa dijadikan pilihan, baik *database engine* maupun *front end*-nya. Diantara *database engine* adalah PostgreSQL, MySQL, SQLServer, dan lain-lain. Diantara *front end* yang berbasis web adalah PHP, ASP, JAVA, dan lain-lain.

**Kata Kunci**— Integrasi sistem, Laporan Keuangan Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, single database dan aplikasi, teknologi informasi.

## I. PENDAHULUAN

PEMERINTAH Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 30.

Dalam pasal 27 ditemukan bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBN yang tertuang dalam laporan keuangan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas APBN. Penyesuaian yang mungkin dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan asumsi-asumsi dalam APBN;
- b. Melakukan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

- d. Melakukan penambahan/pengurangan anggaran untuk suatu organisasi, kegiatan, dan jenis belanja;
- e. Menggunakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyajikan informasi pelaksanaan APBN yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter untuk menggerakkan perekonomian nasional yang sehat, Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebagai pembuat dan pembina Sistem Akuntansi Pemerintah (SiAP).

Wujud pelaksanaan tugas sebagai pembuat dan pembina sistem oleh DJPB adalah lahirnya berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di semua level, mulai tingkat Kementerian sampai dengan Satuan Kerja (Satker). Sistematikanya adalah:

- a. Laporan keuangan tingkat kementerian (disebut Unit Akuntansi Pengguna Anggaran – UAPA) adalah gabungan dari laporan keuangan tingkat eselon 1 lingkup kementerian yang bersangkutan;
- b. Laporan keuangan tingkat eselon 1 (disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – UAPPA-Es1) adalah gabungan dari laporan keuangan tingkat satuan kerja dan wilayah di lingkungannya;
- c. Laporan keuangan tingkat wilayah (disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah – UAPPA-W) adalah gabungan dari laporan keuangan tingkat satker (disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran – UAKPA) di lingkungannya.

## II. URAIAN PENELITIAN

### A. Analisis Masalah

Aplikasi Sistem Akuntansi yang dibuat DJPB sejatinya adalah kelanjutan dari aplikasi-aplikasi lain yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan APBN yang terdiri dari:

1. Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL),
2. Aplikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
3. Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang digunakan oleh Satuan Kerja untuk membuat Surat

Perintah Membayar sebagai alat pencairan dan pembayaran kegiatan yang harus dilakukan.

4. Aplikasi Sistem Informasi Pembukuan Bendahara (SISKA)
5. Aplikasi Persediaan digunakan sebagai pendukung Satuan Kerja dalam mengelola barang habis pakai.
6. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) digunakan sebagai pendukung Satuan Kerja dalam mengelola Aset Tetap.

Aplikasi-aplikasi di atas berjalan pada instansi pemerintah yang jumlahnya mencapai 21.000 dan tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai kondisi.

Walaupun proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan saling terkait, namun aplikasi-aplikasi yang dibuat masih terpisah-pisah, berbasis desktop, terdapat proses yang berulang pada tiap aplikasi, dan terdapat redundansi data serta ketidaksamaan data serupa pada aplikasi yang berbeda.

Sistematika penyusunan laporan keuangan yang bertingkat-tingkat menggunakan aplikasi yang terpisah-pisah menimbulkan masalah tersendiri dalam penggabungan data. Selain membutuhkan banyak proses dan sumber daya yang digunakan, melahirkan *human error*, juga membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini tidak mendukung terwujudnya laporan berkualitas.

**B. Kualitas Laporan Keuangan yang Harus Dicapai**

Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik sebagai berikut [1]:

**1. Relevan**

Relevan artinya dapat mendukung pengambilan keputusan. Laporan dikatakan relevan jika memiliki nilai *feedback* (dapat digunakan untuk mengoreksi kejadian masa lalu), prediktif (dapat digunakan untuk memperkirakan kejadian masa mendatang), tepat waktu (ada pada saat dibutuhkan), dan lengkap (semua informasi yang berkaitan disajikan sehingga mengurangi salah persepsi).

**2. Andal**

Laporan disampaikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral (ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan, tidak membela satu pihak tertentu).

**3. Dapat dibandingkan**

Perbandingan dapat dilakukan antar laporan sejenis (internal) atau antar entitas sejenis (eksternal).

**4. Dapat dipahami**

Laporan disajikan sesuai dengan batas pengetahuan pengguna yang diasumsikan telah memiliki pengetahuan yang cukup atas kegiatan keuangan pada entitas tersebut.

**C. Integrasi Sistem, Sebuah Solusi**

Tantangan untuk mencapai kualitas laporan seperti di atas dengan aplikasi yang tersebar sangat berat. Sejak aplikasi berbasis desktop diterapkan pada tahun 2004, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih berupa

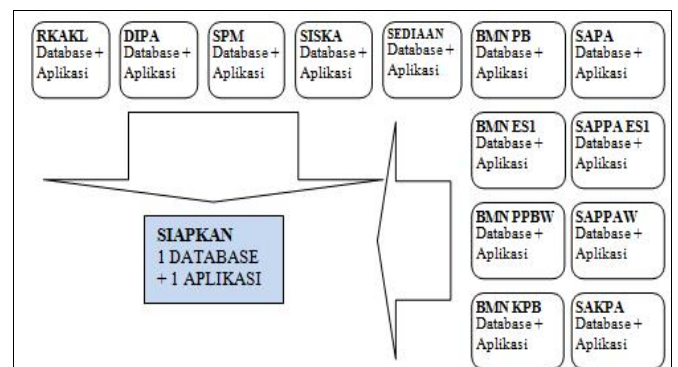
“wajar dengan pengecualian”. Opini tersebut menunjukkan adanya kualitas yang belum dicapai, salah satunya adalah tidak lengkap, terutama pada unsure asset tetap [2]. Mengkonsolidasikan laporan dari sekian ribu instansi memang tidak mudah. Sudah saatnya pemerintah membuat sistem yang terintegrasi untuk menyusun laporan keuangannya.

Integrasi Sistem Informasi sering disebut *Enterprise Information System*, yaitu sebuah platform teknologi yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan dan mengkoordinasikan **proses bisnis** yang mereka miliki [3]. Integrasi sistem akan secara radikal mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan hasil dan secara bersamaan meningkatkan kualitas, keandalan, dan keterjangkauan [4]. Sedangkan Sandoe (2001) mengatakan bahwa integrasi Sistem Informasi bertujuan menggabungkan Sistem Informasi yang tadinya terpisah dengan tujuan sebuah sumber daya informasi yang lebih komplit dan menyeluruh bagi sebuah organisasi [5].

Menjalankan dan memelihara sebuah sistem tentu lebih efisien, efektif, dan mudah. Bentuk-bentuk efisiensi dan efektifitas itu antara lain:

- a. menghilangkan proses-proses yang berulang,
- b. meminimalkan kebutuhan sumberdaya, baik hardware, software, waktu, maupun manusia,
- c. menekan biaya pembangunan sistem karena dapat menggunakan teknologi gratis atau mengurangi jumlah lisensi yang harus dibayar,
- d. mengurangi kegiatan pemeliharaan aplikasi karena tidak lagi terpisah-pisah,
- e. menghilangkan redundansi data,
- f. menciptakan proses yang standar,
- g. konsolidasi data secara *realtime*.

Gambar di bawah ini menunjukkan penyatuan aplikasi dan database.



Gambar 1 Integrasi Sistem Akuntansi Instansi

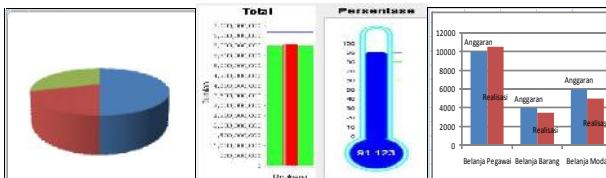
Pilihan teknologi yang tersedia cukup banyak, baik yang gratis maupun yang berbayar, baik dengan membangun sendiri maupun kustomisasi paket sistem. Dari jenis database ada PostgreSQL, MySQL Server, Java DB, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Sedangkan untuk membangun aplikasinya dapat memilih PHP, ASP, Java, VB.net, atau lainnya. Adapun jika

menginginkan kustomisasi paket, yang terkenal adalah Oracle Finance dan SAP.

Dukungan untuk menciptakan sistem terintegrasi juga datang dari teknologi internet. Konsolidasi data secara realtime sebagai salah satu cara agar laporan dapat tersaji tepat waktu, sangat mungkin dilakukan dengan membuat aplikasi berbasis web. Kemudahan umum yang diberikan oleh internet adalah dapat mengakses sistem di mana saja dan kapan saja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Silius dan Tervakari (2010), bahwa aplikasi berbasis web akan meningkatkan kegunaan, kemampuan, nilai tambah atas proses dan pengembangannya, efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas informasi yang dihasilkan. [6].

#### D. Bentuk Laporan

Tujuan utama dibuatnya laporan keuangan selain sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah sebagai pendukung pengambilan keputusan. Visualisasi laporan yang informatif akan sangat membantu para pengambil keputusan dalam menangkap informasi. Format Laporan Keuangan Pemerintah yang berupa tabel-tabel dengan ukuran huruf yang relatif kecil cukup menyulitkan dalam pemahamannya. Sudah saatnya dibuat pula bentuk laporan alternatif. Bentuk visual yang sudah jamak dipakai dalam dunia analisis adalah grafik atau *dashboard*. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa gambar lebih bermakna daripada seribu kata-kata. Dengan grafik kita dapat lebih mudah dalam membaca komposisi data, *trend* data, atau menarik sebuah kesimpulan. Contoh bentuk grafik adalah gambar di bawah ini.



Gambar 2 Contoh grafik

### III. KESIMPULAN/RINGKASAN

Kewajiban Pemerintah RI untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan, namun kualitasnya belum maksimal. Hal ini terungkap dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada pengecualian dalam kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011. Salah satu kendala yang dihadapi adalah dalam menyajikan laporan yang relevan (tepat waktu, lengkap) dan andal (dapat diverifikasi). Penyebabnya antara lain karena sistem informasi yang digunakan belum terintegrasi. Mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, harus dilakukan segala upaya perbaikan, seperti membuat sistem yang terintegrasi. Integrasi sistem informasi memberikan berbagai keuntungan dalam efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas. Dukungan untuk menciptakan integrasi sistem telah ada baik dari sisi teknologi, manusia, maupun dana.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis A.N. mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan dukungan finansial melalui Beasiswa Internal tahun 2009-2012, para Dosen yang telah membagi ilmu, teman-teman sejawat dari DJPBN yang telah menemani perjuangan, dan teman-teman mahasiswa ITS yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 22 Oktober 2010.
- [2] Publikasian Ditjen Perbendaharaan. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011. Availabel: <http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2904> (2012).
- [3] M. Sinamblea, Josua, Integrasi Sistem Informasi. Yogyakarta: UGM (2012).
- [4] Brosey, W.D, et all. 2001. *Grand Challenges Of Enterprise Integration*. Tenesse: Y-12 National Security Complex, (2001).
- [5] Kent Sandoe, Gail Corbitt, Raymond Boykin. *Enterprise Integration*. John Wiley & Sons, Inc, (2001).
- [6] Silius, Kirsi dan Tervakari, A.M. 2002. *An Evaluation Of The Usefulness of Web-based Learning Environment*. Finlandia: Tampere University of Technology, Digital Media Institute, (2002).